

**PEMBATALAN AKTA JUAL BELI OLEH PENGADILAN NEGERI
TERHADAP KEDUDUKAN HARTA BAWAAN YANG DIPEROLEH
SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEMATIAN.**

(Studi Kasus Nomor: 290/PDT.G/2013/PN.MDN).

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Megisterr Kenotariatan



Oleh:

RADHIAN ANHAR
NIM 2020123027

Pembimbing :

- 1. PROF. DR. YULIA MIRWATI, S.H., CN, M.H**
- 2. DR. YASNIWATI, S.H., M.H**

**MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

**PEMBATALAN AKTA JUAL BELI OLEH PENGADILAN NEGERI TERHADAP
KEDUDUKAN HARTA BAWAAN YANG DIPEROLEH SETELAH PUTUSNYA
PERKAWINAN KARENA KEMATIAN.**

(Studi Kasus Nomor: 290/PDT.G/2013/PN.MDN).

**Radhian Anhar, Program Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 101 halaman, Tesis 2022**

ABSTRAK

Mengalihkan hak atas tanah seseorang terhadap kedudukan harta bawaannya, secara norma dan ketentuan-ketentuan hukum diakui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 ayat 2, kepada siapa hak atas tanah tersebut dialihkan atau di jual, itu adalah hak mutlak yang memegang hak atas tanah dan bangunan tersebut. tetapi yang terjadi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 290/PDT.G/2013/PN.Mdn, penjualan hak atas tanah tersebut yang dibuat dihadapan Suriaty Sandery Tania Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 12 tanggal 10 Mei 2007 di batalkan, dengan pertimbangan Hakim harta tersebut adalah harta bersama para ahli waris, karena perolehannya ketika orang tua para penggugat dan tergugat masih hidup, padahal harta tersebut di peroleh ketika orang tua perempuan nya berstatus janda. Maka dari putusan ini ada suatu ketimpangan antara das sollen dengan das sein nya. Rumusan masalah yang di bahas dalam dalam penelitian ini : (1) Apakah pembatalan akta jual beli berdasarkan putusan pengadilan negeri nomor 290/PDT.G/2013/PN.Mdn sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum? (2) Bagaimana pertimbangan hakim mengenai Pembatalan Akta Jual Beli berdasarkan Putusan Nomor 290/PDT.G/2013/PN.Mdn? (3) Bagaimana akibat hukum pembatalan akta jual beli terhadap kedudukan harta bawaan yang di peroleh setelah putusnya perkawinan karena kematian? Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative, hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) secara kepastian hukum perbuatan yang di lakukan oleh Janda tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, dan Notaris/PPAT selaku pejabat yang berwenang membuat akta Jual beli nya berdasarkan data-data formil yang ada dan juga sesuai dengan norma-norma yang ada karena status harta yang diperoleh setelah putusnya perkawinan karena kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu menjadi mutlak harta pribadi seseorang sepanjang tidak adanya percampuran harta asal dari perkawinan nya dahulu, dan itu di buktikan apabila ada percampuran harta bersamanya dahulu. (2) pertimbangan hukum hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn, hakim memutuskan perkara ini berdasarkan keyakinan dan bukti materis saja, padahal bukti formil dalam bidang hokum perdata harus di perhatikan juga. (3) akibat hukum pembatalan akta jual beli tersebut, tidak adanya perlindungan hokum yang di dapat oleh si tergugat, maka dari itu si tergugat merasa di rugikan, baik secara materil maupun secara inmateril.

Kata Kunci: Pembatalan Akta Jual Beli, Kedudukan Harta Bawaan,

CANCELLATION OF THE SELLING BUYING DEED BY THE STATE COURT ON THE POSITION OF CONFIDENTIAL ASSETS OBTAINED AFTER THE TERMINATION OF MARRIAGE BECAUSE OF DEATH.

(Case Study Number: 290/PDT.G/2013/PN.MDN).

Radhian Anhar, Notary Megister Program, Faculty of Law, Andalas University, 101 pages, Thesis 2022

ABSTRACT

Transferring a person's land rights to the position of his or her innate assets, legally recognized norms and provisions, based on Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, in particular Article 35 paragraph 2, to whom the right to the land is transferred or sold, it is the absolute right that holds the rights to the land and buildings. but what happened to the decision of the Medan District Court Number: 290/PDT.G/2013/PN.Mdn, the sale of the rights to the land was made before Suriaty Sandery Tania, Bachelor of Law, Land Deed Making Officer, based on the Sale and Purchase Deed Number: 12 dated 10 May 2007 was canceled, with the judge's consideration that the property is joint property of the heirs, because the acquisition was when the parents of the plaintiffs and defendants were still alive, even though the property was obtained when the woman's parents were widows. So from this decision there is an imbalance between *das sollen* and *das sein*. The formulation of the problem discussed in this study: (1) Is the cancellation of the sale and purchase deed based on the decision of the district court number 290/PDT.G/2013/PN.Mdn in accordance with the legal provisions? (2) What is the judge's consideration regarding the Cancellation of the Sale and Purchase Deed? based on Decision Number 290/PDT.G/2013/PN.Mdn? (3) What are the legal consequences of the cancellation of the deed of sale and purchase on the position of the innate assets obtained after the divorce due to death? The method used in this research is normative research, the results of the research obtained are (1) legally the actions carried out by The widow is in accordance with legal provisions, and the Notary/PPAT as the official authorized to make the deed of sale and purchase based on existing formal data and also in accordance with existing norms because of the status of the property obtained after the termination of the marriage due to death based on the law. - Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage become absolute personal property of a person as long as there is no mixing of assets from his previous marriage, and it is proven if there is a mixture of his joint assets first. (2) the judge's legal considerations in the Medan District Court Decision Number 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn, the judge decided this case based on belief and material evidence only, even though formal evidence in the field of civil law must also be considered. (3) the legal consequences of the cancellation of the deed of sale and purchase, there is no legal protection obtained by the defendant, therefore the defendant feels that he has been harmed, both materially and immaterially.

Keywords: Cancellation of Deed of Sale and Purchase, Position of Congenital Assets